



WALIKOTA AMBON

---

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR- 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERGESERAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN SEBELUM  
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan dasar kepada Masyarakat maka Walikota Ambon memandang perlu menetapkan pergeseran dan penggunaan anggaran belanja kegiatan yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mendahului Pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon (APBD Perubahan) Tahun Anggaran 2013 belum ditetapkan, maka untuk mendanai belanja dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran negara Nomor 1645 );
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kotamadya Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 29 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 29 Seri A Nomor 03);
21. Peraturan Walikota Ambon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERGESERAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2013**

**Pasal 1**

Pengeluaran untuk belanja yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

**Pasal 2**

- (1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana pada pasal 1 merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun Anggaran yang berjalan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- (2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

**Pasal 3**

- (1) Selain belanja sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2), beberapa kegiatan yang sangat mendesak sesuai jadwal tidak dapat ditunda pelaksanaannya termasuk kegiatan tahun sebelumnya yang belum diakomodir dalam APBD Tahun 2013 tetapi secara fisik telah selesai 100% (seratus persen).
- (2) Kegiatan - kegiatan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum pada Lampiran I dan lampiran II Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 4**

Belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3, dapat dilakukan dengan mempedomani Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sudah melalui mekanisme pembahasan bersama dan dilakukan secara selektif.

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 1 Pebruari 2013

WALIKOTA AMBON, *al.*  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 1 Pebruari 2013

SEKRETARIS KOTA AMBON,



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2013 NOMOR 4



No.	SKPD	Uraian	Kegiatan	Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Sebelum	Setelah	Bertambah/Berkurang		
1	BEANJIA LANGSUNG	Badan Pengelola Keuangan Kota/PPKD	1 Cetak dan Penggandaan 2 Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan 3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012 4 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012 5 Penataan Kearsipan Keuangan 6 Pengadaan Peralatan Kantor 7 Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengelola Keuangan Daerah 8 Pengelolaan Gaji PNS	743,160,000	654,125,850	(89,034,150)	APBD APBD APBD	Pergeseran dari Keg. Cetak dan Penggandaan
				60,170,000	121,657,000	61,487,000		
				182,064,600	240,486,450	58,421,850		
				182,496,912	213,109,212	30,612,300		
				84,784,000	125,000,000	40,216,000		
				84,994,925	93,994,925	9,000,000		
				-	180,000,000	180,000,000		
				31,929,000	72,797,250	40,868,250		
	<b>BPKK / PPKD</b>			1,369,599,437	1,701,170,687	331,571,250		
2	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja		1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda empat	325,000,000	362,000,000	37,000,000	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
3	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan		1 Perencanaan Ambon Bersih 2 Pembuatan Bak Sampah 3 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Tossa) 4 Pemeliharaan Taman Hijau/Taman Kehati 5 Pembuatan Sumur Resapan 6 Pembuatan Lingkungan Hijau 7 Pemeliharaan Sumur Resapan	325,000,000	362,000,000	37,000,000	APBD APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
				988,591,500	988,591,500	-		
				100,000,000	95,000,000	(5,000,000)		
				29,647,100	-	(29,647,100)		
				487,500,000	260,000,000	(227,500,000)		
				82,159,150	361,442,250	279,283,100		
				17,136,000	-	(17,136,000)		
	<b>Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan</b>			1,705,033,750	2,353,791,750	648,758,000		
4	Dinas Tata Kota		1 Penguatan Kapasitas/Bimtek bagi PPK dan PPTK - Biaya Alat Tulis Kantor - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman 2 Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Pertemuan Desa Laha 3 Pembangunan Jln. Lingkungan & Bangunan Pelengkap Kota Ambon	41,137,000	212,997,500	171,860,500	APBD	Pergeseran rincian belanja kegiatan namun tidak merubah pagu anggaran
				14,897,200	18,137,200	3,240,000		
				6,375,000	7,975,000	1,600,000		
				5,649,800	6,474,800	825,000		
				2,625,000	8,550,000	5,925,000		
				11,590,000	-	(11,590,000)		
				-	81,001,900	81,001,900		
				-	90,858,600	90,858,600		



No.	SKPD	Uraian	Kegiatan	Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Sebelum	Setelah	Bertambah/ Berkurang		
5	Bagian Umum dan Perlengkapan		1 Penyelesaian masalah tanah-tanah Permda 2 Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat 3 Pengadaan Mobil Jabatan/Dinas 4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 5 Penilaian Asset Daerah 6 Jasa Pengiriman Barang 7. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Kecamatan (Roda Dua) 8. Penyediaan Jasa Rekening Listrik 9 Kegiatan Workshop Peningkatan Pelayanan Publik	581,000,000	1,200,000,000	619,000,000	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
				602,700,000	712,700,000	110,000,000	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
				561,882,000	1,011,882,000	450,000,000	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
				400,000,000	669,808,000	269,808,000	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
				-	469,944,925	469,944,925	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
				-	150,000,000	150,000,000		
				-	87,500,000	87,500,000		
				4,500,000,000	13,386,899,712	8,886,899,712		
				-	545,245,000	545,245,000		
				6,645,582,000	18,233,979,637	11,588,397,637		
6	BPMP-KB		1 Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan 2 Pengadaan Sepeda Motor 3 Pengadaan Personal Komputer 4 Implan Removal 5 IUD KIT 6 Pengadaan KIE KIT 7 Obbygn Bed 8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayaran Komunikasi, Edukasi dan Advokasi (KIE BKB) 9 Workshop Pembentukan Forum Anak dan 10 Promosi kelompok UPPK pada Jambore Tingkat asional	508,451,550	-	(508,451,550)	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				-	88,025,509	88,025,509	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				-	330,017,530	330,017,530	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				-	28,022,322	28,022,322	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				-	55,002,921	55,002,921	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				138,000,000	-	(138,000,000)	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				-	416,376,283	416,376,283	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				30,000,000	124,277,434	94,277,434	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				-	8,970,000	8,970,000	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				-	265,770,000	265,770,000	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
676,451,550	1,316,461,999	640,010,449						
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		1 Pembangunan Gedung UPTD Metrologi 2 Pengadaan Peralatan Minimal Kemetrologian 3 Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan UPTD Metrologi 4 Pematangan Lahan Pembangunan UPTD Metrologi 5 Pengadaan Meubeler Gedung UPTD Metrologi 6 Pengadaan komputer Gedung UPTD Metrologi 7 Pengadaan Perlengkapan Kantor Gedung UPTD Metrologi 8 Renovasi Pasar Mardika 9 Perencanaan dan Pengawasan Renovasi Pasar Mardika 10 Pengadaan Tanah Pasar	1,800,000,000	2,765,973,575	965,973,575	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				1,185,224,000	236,667,675	(948,556,325)	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				155,496,000	156,939,675	1,443,675	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				-	101,913,575	101,913,575	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				-	17,760,000	17,760,000	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				-	10,300,000	10,300,000	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				-	8,913,800	8,913,800	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				959,134,000	989,647,575	30,513,575	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				92,302,000	93,545,675	1,243,675	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				500,000,000	309,101,700	(190,898,300)	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK

No.	SKPD	Uraian	Kegiatan	Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Sebelum	Setelah	Bertambah/(Berku- rang)		
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		11 Pembangunan Pasar Oleh-oleh Tahap Akhir (Fisik) 12 Pembangunan Los dan Kios Pasar Terminal Transit Passo 13 Rehabilitasi Pasar Mardika (Pembangunan Kios di areal seputaran belakang Bank Mandiri) 14 Perencanaan & Pengawasan Pembangunan Los dan Kios Terminal Transit Passo 15 Perencanaan & Pengawasan Pembangunan Los dan Kios Terminal Mardika	310,508,000	311,900,750	1,392,750	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				500,000,000	-	500,000,000	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				-	500,000,000	500,000,000	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				57,250,000	-	57,250,000	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				-	57,250,000	57,250,000	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				5,559,914,000	5,559,914,000	-	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				74,749,290	-	(74,749,290)	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				278,198,377	-	(278,198,377)	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				2,184,030,100	-	(2,184,030,100)	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				343,996,927	-	(343,996,927)	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				234,497,777	-	(234,497,777)	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				544,494,964	875,000,000	330,505,036	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				-	350,650,000	350,650,000	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				-	792,542,212	792,542,212	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
				-	1,105,433,675	1,105,433,675	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK
-	141,342,608	141,342,608	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK				
-	199,350,000	199,350,000	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK				
-	195,648,940	195,648,940	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK				
3,659,967,435	3,659,967,435	-	DAK	Penyesuaian terhadap Juknis DAK				
9	Dinas Perhubungan		1 Pengadaan Sahu Labuh 2 Pembuatan Salasar, Pagar Pengaman dan Pos Tagih Dermaga Speed Boat 1 Pengadaan Gembok (Parkir)	-	200,000,000	200,000,000	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
				-	100,000,000	100,000,000	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
				-	50,000,000	50,000,000	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
10	Dinas Pekerjaan Umum		1 Pengadaan Tempat Duduk Beton 2 Perbaikan Jalan Mangga Dua, Kusu-Kusu, Mahla 3 Servey Tim Verifikasi Meter JPU dan Fasilitas Kantor Pemerintah	-	350,000,000	350,000,000	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
				-	58,000,000	58,000,000	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
				-	1,500,000,000	1,500,000,000	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
	Dinas Pendidikan		1 Pemasangan Speedy	-	84,000,000	84,000,000	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
				-	84,000,000	84,000,000	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
				-	84,000,000	84,000,000	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung

11	Dinas Kebersihan		1	Pengadaan Jaring	-	189,000,000	189,000,000	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
			2	Pengomposan dan Tanaman dalam pot pada areal publik	-	180,000,000	180,000,000	APBD	
			3	Extra fudeng + TPS	-	800,000,000	800,000,000	APBD	
	Dinas Kebersihan			-	1,169,000,000	1,169,000,000			
12	Bagian Tata Pemerintahan		1	Workshop Peningkatan Pelayanan Publik	-	528,833,000	528,833,000	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
				Bagian Tata Pemerintahan			-	528,833,000	
13	Bagian Humas dan Protokol		1	Operasional Pelayanan Kehumasan Pemkot	499,500,000	546,945,500	47,445,500	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
			2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratiran Perundangan	73,020,000	145,680,000	72,660,000	APBD	
			3	Kerjasama Masmadia	-	330,454,500	330,454,500		
	Bagian Humas dan Protokol			572,520,000	1,023,080,000	450,560,000			
14	Dinas Kesehatan		1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	33,800,000	41,600,000	7,800,000	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
				Dinas Kesehatan			33,800,000	41,600,000	
15	Badan Kepegawaian		1	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi keluar Daerah	255,711,000	286,566,000	30,855,000	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
			2	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	90,360,000	64,599,000	(25,761,000)		
			3	Raker Kepegawaian	102,777,025	-	(102,777,025)		
			4	Sosialisasi PP 46 Tahun 2011	-	108,567,076	108,567,076		
			5	Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan (PIM Tkt II)	350,000,000	200,000,000	(150,000,000)		
			6	Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan (PIM Tkt III)	634,662,300	655,149,100	20,486,800		
			7	Pengembangan Absen Figer Print	-	74,629,149	74,629,149		
			8	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	44,000,000	44,000,000		
	Badan Kepegawaian			1,433,510,325	1,433,510,325	-			
16	Dinas Perikanan dan Kelautan		1	Pembangunan Rumah Kemasan	383,480,000	-	(383,480,000)	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
			2	Pengadaan Kadal Pesisir	-	337,547,000	337,547,000		
			3	Magang Bagi Pengelola Peralatan Kemasan	-	19,090,000	19,090,000		
			4	Peencanaan Pengawasan Purse & Pancing Tonda	-	26,843,000	26,843,000		
	Dinas Perikanan dan Kelautan			383,480,000	383,480,000	-			
17	BPBD		1	Pembangunan Rumah Pengungsi	-	3,147,690,850	3,147,690,850	APBD	Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung
				BPBD			-	3,147,690,850	
					3,147,690,850	3,147,690,850			

